

NORMALIZING RIVER FLOWS (DAS) IN REALIZING CONDUSIVE DEVELOPMENT

Joko Sunaryo

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

Email : jokosunaryo21@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out the programs carried out by local governments in the context of Normalizing the watershed. This research uses descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews with informants as many as 8 people. The results of the Normalization Study of the Watershed (DAS) of Central Rimbo Subdistrict, Bungo Regency have been carried out but have not been maximized due to the low level of public awareness and the lack of integration of spatial planning systems with rural areas. Constraints in Normalizing Watersheds Efforts made (1) Strengthening coordination and capacity (2) Placing apparatus human resources who truly understand watershed issues (3) Realizing participatory, responsive and democratic governance by prioritizing trust, a culture of hard work and high discipline and able to motivate the people.

Keywords: Normalization, Watershed, Spatial Development, Bungo

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka Normalisasi DAS. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dengan informan sebanyak 8 orang. Hasil Penelitian Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo telah dijalankan namun belum maksimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya sistem perencanaan tata ruang dengan kawasan pedesaan. Kendala-kendala dalam Normalisasi DAS Upaya-upaya yang dilakukan (1) Penguatan koordinasi dan kapasitas (2) Menempatkan SDM aparatur yang benar-benar memahami persoalan DAS (3) Mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsif dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan, budaya kerja keras serta disiplin tinggi dan mampu memotivasi rakyat.

Kata Kunci: Normalisasi, DAS, Pembangunan Tata Ruang, Bungo

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi makhluk hidup terutama bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka aktifitas penggunaan sumber daya alam, khususnya sumber daya air juga semakin meningkat, maka sumber daya air perlu ditingkatkan pelestariannya dengan menjaga keseimbangan siklus air di bumi yang dikenal sebagai daur hidrologi. Proses daur hidrologi di alam bermanfaat sebagai sumber daya yang

terbaharukan, secara global kuantitas sumber daya air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.

Selain untuk kebutuhan makhluk hidup, air juga dapat dimanfaatkan untuk pengairan, pembangkit tenaga listrik, industri, pertanian, perikanan dan sumber baku air minum. Terkait dengan kebutuhan yang beragam tersebut, ketersediaan air yang memenuhi baik kuantitas maupun kualitas untuk kebutuhan sangatlah terbatas, ketersediaan air terutama air permukaan sangat bergantung pada pengelolaan asal air tersebut, yaitu sungai yang merupakan salah satu air permukaan yang perlu dikelola, sungai-sungai tersebut tergabung dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Secara umum DAS dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah, yang dibatasi oleh batas alam, seperti punggung bukit atau gunung, maupun batas buatan seperti jalan atau tanggul, dimana air hujan yang turun di wilayah tersebut memberikan kontribusi aliran ke titik kontrol, sehingga usaha-usaha pengelolaan DAS adalah sebuah bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan yang pada dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan sumberdaya alam di suatu DAS secara rasional untuk mencapai tujuan produksi yang optimum dalam waktu yang tidak terbatas sehingga distribusi aliran merata sepanjang tahun.

DAS merupakan ekosistem, dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan didalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi. Aktivitas perubahan tataguna lahan dan pembuatan bangunan konservasi yang terjadi didaerah hulu dapat memberikan dampak pada daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit air dan transport sedimentasi material terlarut lainnya atau *non point pollution*.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang system kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*).

Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan tidak adanya adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana daerah berlomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Permasalahan ego-sektoral dan ego-kedaerahan ini akan menjadi sangat kompleks pada DAS yang lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan dalam DAS maka perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu.

Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam skala DAS secara efektif dan efisien.

Berdasarkan sudut pandang biofisik, yang dimaksud dengan daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan

DAS yang tidak dijaga kelestarian indikator-indikator pembentukannya berpotensi menjadi awal dari bencana alam terutama banjir. Pada dasarnya bencana banjir dan longsor yang terjadi tidak terlepas dari perlakuan manusia terhadap sungai dan wilayah pengaruhnya, baik yang berada di daerah hulu, tengah maupun hilir yang merupakan satu kesatuan sistem aliran sungai, yang dikenal sebagai Satuan Wilayah Sungai (SWS). Meluasnya dampak banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah aliran sungai, terutama kondisi daerah resapan airnya (*catchment area*), sedimentasi badan-badan air, dan kondisi waduk/danau/situ sebagai penahan air (*water retention*). Disamping itu tingkat urbanisasi yang tinggi di kota-kota besar semakin mengurangi daerah resapan air dan penahan air tadi, serta semakin menyempitkan bantaran sungai dan drainase karena tumbuhnya daerah permukiman dan timbunan sampah domestik.

Penanganan DAS pada akhirnya memerlukan pendekatan yang khusus, menyeluruh dan terpadu. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu merupakan sebuah pendekatan holistik dalam mengelola sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara berkesinambungan. Di daerah

dataran tinggi curah hujan yang jatuh akan mengalir dan berkumpul pada beberapa parit, anak sungai, dan kemudian menuju ke sebuah sungai. Keseluruhan daerah yang menyediakan air bagi anak sungai dan sungai-sungai tersebut merupakan daerah tangkapan air (*Catchment area*), dikenal sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan unit hydro-geologis yang meliputi daerah dalam sebuah tempat penyaluran air. Air hujan yang jatuh di daerah ini mengalir melalui suatu pola aliran permukaan menuju suatu titik yang disebut outlet aliran air. Untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan, DAS dibagi menjadi tiga bagian, yaitu DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir. Daerah hulu merupakan daerah yang berada dekat dengan aliran sungai yang merupakan tempat tertinggi dalam suatu DAS, sedangkan daerah hilir adalah daerah yang dekat dengan jalan ke luar air bagi setiap DAS dan daerah tengah adalah daerah yang terletak di antara daerah hulu dan daerah hilir. Sementara dari sudut pandang pengelolaan, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur - unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat dan pengelola sumberdaya alam tersebut. DAS dipandang sebagai basis utama yang tepat dalam membentuk unit pembangunan berkelanjutan yang berpilarkan ekologi, ekonomi dan sosial dikarenakan beberapa hal, yaitu: DAS merupakan sistem alami yang jelas batas-batasnya, rentang area dimulai dari pegunungan sampai dengan pesisir beserta area diantaranya, dapat memberikan pandangan secara holistik dari berbagai komponen pembentuknya, memperlihatkan bagaimana ekosistem dataran tinggi, rendah dan pesisir saling berhubungan dan sederhana dalam memonitoring pengaruh berbagai aktifitas/kegiatan terhadap lingkungan. Sebagai sebuah unit pembangunan berkelanjutan sistem DAS mempunyai kerangka kerja yang mendorong kolaborasi atau kerjasama diantara stakeholder (pemangku kewajiban) untuk mengelola, mempertahankan dan mendistribusikan manfaat kepada stakeholder generasi sekarang dan mendatang, diantara dan diluar unit tersebut.

Sehingga sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa suatu Daerah Aliran Sungai merupakan suatu megasistem kompleks yang dibangun atas sistem fisik (*physical systems*), sistem biologis (*biological systems*) dan sistem manusia (*human systems*) dimana setiap sistem dan sub-sub sistem di dalamnya saling berinteraksi. DAS sebagai suatu sistem akan memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar komponennya. Kualitas output dari suatu ekosistem sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antar komponennya, sehingga dalam proses ini peranan tiap-tiap komponen dan hubungan antar komponen sangat menentukan kualitas ekosistem

DAS memiliki aspek sosial yang kompleks. Sebagian penduduk yang memiliki tanah di DAS atau yang bergantung pada sumber DAS tidak tinggal di dalam DAS tersebut. Dengan kata lain ada petani yang tinggal di luar DAS, yang merupakan pemilik lahan pertanian yang terletak dalam suatu DAS atau penduduk yang memanfaatkan sumber daya alam ini. Ada petani yang tidak memiliki lahan garapan, dan ada petani yang memiliki lahan di beberapa DAS. Aspek sosial ini sangat berperan dalam pembentukan sebuah lembaga yang mengelola program DAS.

Oleh karena itu, kompleksitas ini sangat penting untuk dipahami sebelum sebuah lembaga terbentuk.

Tujuan pengelolaan DAS terpadu adalah membantu masyarakat mengembangkan visinya tentang apa yang mereka inginkan terhadap DAS yang berada di daerah mereka, misalnya dalam 10 tahun ke depan, dan mencari strategi untuk mencapai visi tersebut. Program ini hanya menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi yang secara kritis dipicu oleh faktor pemicu dan mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan untuk memenuhi visi tersebut.

Maksud pengelolaan DAS terpadu adalah suatu pendekatan yang melibatkan teknologi tepat guna dan strategi sosial untuk memaksimalkan pengembangan lahan, hutan, air dan sumberdaya manusia dalam suatu daerah aliran sungai, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkesinambungan. Dengan kata lain pengelolaan DAS ini bertujuan agar generasi masa depan dapat menikmati sumberdaya alam yang lebih sehat dan lebih produktif dari generasi sekarang. Di masa mendatang penduduk jangan lagi dianggap hanya penerima manfaat, tetapi mereka harus ikut berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pembuatan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain faktor manusia yang lebih dominan, terdapat faktor-faktor alam yang sifatnya kurang dominan namun turut mempengaruhi terjadinya banjir diantaranya adalah: kondisi geomorfologi (dataran rendah/ perbukitan, ketinggian dan lereng, bentuk sungai), geologi, hidrologi (siklus, kaitan hulu-hilir, kecepatan aliran), iklim (kelembaban, angin, durasi dan intensitas curah hujan), dan pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh fenomena pemanasan global (*global warming*).

Demikian pula dengan yang terjadi di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah masalah banjir selalu menjadi topik yang berulang-ulang dihadapi namun sampai saat ini belum terselesaikan atau belum ditemui solusinya. Banjir di Dusun Sungai Buluh adalah akibat meluapnya Sungai Benit. Meluapnya Sungai Benit karena bentang DAS mengalami perubahan dan tak lagi bisa berfungsi ideal seperti ketika belum ada perubahan penggunaan lahan. Persoalannya, dinamika perubahan penggunaan lahan adalah hal yang tidak dapat dihindari pada perkembangan sebuah wilayah, terutama Kabupaten Bungo yang tergolong memiliki tingkat aktivitas pembangunan cukup tinggi. Selain itu adanya peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan yang mau tidak mau akan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Perilaku masyarakat banyak berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Tentu saja hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan jenis dan jumlah vegetasi penutup tanah sehingga kondisi lahan yang rusak semakin meningkat.

Pada sisi lain penyebabnya adalah dengan adanya perubahan tata lahan di DAS Sungai Benit yaitu adanya proyek *Box Culvert* di landasan pacu Bandara Muara Bungo sehingga

mempengaruhi karakteristik DAS tersebut seperti: debit puncak (*peak flow*), volume air larian (*run off volume*), koefisien air larian dan lain-lain. Pada akhirnya kondisi ini ikut mempengaruhi kondisi DAS Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah.

Persoalan lain yang membuat kondisi Aliran Sungai Benit memburuk adalah maraknya aksi penambangan emas konvensional atau lebih dikenal dengan istilah Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Aktivitas PETI merupakan kegiatan yang sudah lama ada di Kabupaten Bungo tak terkecuali di Aliran Sungai Benit. Penggunaan alat yang dikenal dengan nama dompeng untuk menyedot pasir dari dasar sungai yang kemudian disaring untuk mendapatkan butiran emas membuat proses pendangkalan sungai terus terjadi dan secara alamiah mempersempit alur sungai. Kondisi ini sudah lama terjadi.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, ditemui fenomena-fenomena sebagai berikut: Banjir hampir setiap tahun melanda Dusun Sungai Buluh sebagai akibat tertutupnya atau menyempitnya daerah aliran sungai karena aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI); Pengelolaan DAS berupa pemanfaatan, pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan pengendalian sumber daya dalam DAS Benit yang melintasi Dusun Sungai Buluh tidak optimal karena belum adanya masterplan pengelolaan DAS dalam Kabupaten Bungo.

Produktivitas lahan masyarakat Dusun Sungai Buluh terganggu akibat tergenang banjir yang akhirnya berdampak kepada aktivitas ekonomi yang mayoritas adalah berkebun. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu (multi sektoral), menyeluruh (hulu-hilir, kualitas-kuantitas, berkelanjutan (antar generasi)), berwawasan lingkungan dengan DAS (satuan wilayah hidrologis) sebagai kesatuan pengelolaan. Satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan secara terpadu dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang sekarang (desentralisasi) dapat ditentukan bahwa :Satuan sungai dalam artian DAS yang merupakan kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan; Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan rencana kerja yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Dalam satu sungai ditetapkan satu sistem pengelolaan yang dapat menjamin keterpaduan kebijakan strategis dan perencanaan operasional dari hulu sampai hilir.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara nasional dilakukan secara holistik, terencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pengembangan serta pengelolaan sumber daya air yang bersifat spesifik harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan tetap memperhatikan kesatuan wilayah DAS.

Pendayagunaan sumberdaya air harus berdasarkan prinsip partisipasi dan konsultasi pada masyarakat di setiap tingkatan dan mendorong pada tumbuhnya komitmen bersama antar pihak-pihak terkait (stakeholder) dan penyelenggaraan seluruh kegiatan/aktivitas yang layak secara sosial. Sesuai dengan definisi pengelolaan DAS yaitu upaya manusia dalam mengendalikan

hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan, maka sebagai konsekuensinya setiap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang mengatur tentang alokasi sumberdaya alam akan langsung berpengaruh terhadap keberadaan suatu DAS sebagai satuan ekosistem dengan segala komponen yang ada. Keterpaduan pengelolaan DAS sangat diperlukan yaitu dalam upaya pendekatan ekosistem karena pengelolaan DAS ini melibatkan semua pihak yang sangat berkepentingan dan sangat kompleks yaitu melibatkan multi sumberdaya (alam dan buatan), multi kelembagaan, multi para pihak terkait (stakeholder) dan bersifat lintas batas (administrasi dan ekosistem).

Pola pengelolaan DAS bertumpu pada mekanisme koordinasi dan kooperasi. Fungsi koordinasi adalah proses pengendalian berbagai kegiatan, kebijakan atau keputusan berbagai organisasi dan kelembagaan sehingga tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati. Dua aspek penting dalam koordinasi adalah aspek koordinasi kebijakan dan koordinasi kegiatan atau program.

Koordinasi kebijakan secara umum menyerupai koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Karena pengelolaan DAS melibatkan banyak sektor maka akan terjadi tumpang tindih kebijakan dan bahkan tabrakan kepentingan antar departemen sektoral. Untuk mencegah permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan yaitu: Koordinasi kebijakan preventif, yaitu pencegahan sedini mungkin terjadinya tabrakan kepentingan antara berbagai instansi yang terkait; Koordinasi strategis, lebih diarahkan kepada upaya penyalarsan antara suatu kebijakan tertentu dengan kepentingan strategis pencapaian tujuan umum yang telah disepakati bersama; Koordinasi program secara umum lebih berkaitan dengan koordinasi kegiatan administrasi, dibedakan menjadi ; Koordinasi administrasi prosedural, pada umumnya diarahkan untuk menciptakan keselarasan berbagai prosedur dan metoda administratif. Koordinasi administrasi substansial, yang diarahkan untuk menciptakan keselarasan kerja dan kegiatan (sinergi), bagi setiap unit organisasi termasuk individu dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan akhir yang telah disepakati bersama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan mahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Maka dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi atau dipilih menjadi sampel atau Unit Analisis adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Unit analisis adalah sebagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Unit analisis yang baik atau representatif adalah agar dapat mewakili populasi harus dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik sampling yang dianggap lebih cocok.

Dalam pengambilan Unit analisis, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penarikan Unit analisis yang memberikan kesempatan yang tidak sama terhadap setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai Unit analisis. Artinya, populasi yang dijadikan sebagai Unit analisis oleh peneliti dianggap memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi objek utama penelitian. Adapun yang menjadi Unit analisis atau Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu: Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo; Rio Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo; Kepala Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo; Kepala Seksi Rehabilitasi dan pemulihan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 4 (empat) orang masyarakat Dusun Sungai Buluh yang terdiri dari: Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh wanita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi DAS di Dusun Sungai Buluh membutuhkan perhatian khusus karena berkaitan dengan posisi wilayahnya yang merupakan zona penyangga bagi aktivitas yang berlangsung di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Bungo. Bertambahnya tingginya aktivitas di kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan akan mempengaruhi kualitas lingkungan termasuk yang ada di wilayah sekitarnya seperti Dusun Sungai Buluh.

Kemampuan lingkungan dalam menjalankan fungsi ekologisnya sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan itu sendiri. Memperhatikan perkembangan pembangunan yang terjadi di sekitar Kota Muara Bungo yang banyak mengakibatkan alih fungsi lahan seperti pembangunan gedung, ruko serta sarana fisik lainnya akan sangat mempengaruhi kondisi ekosistem seperti kemampuan daya serap air tanah, kemampuan tanah dalam menahan tekanan dan kemampuan ekosistem untuk tetap mempertahankan kualitas ekologis. Termasuk yang menjadi perhatian besar adalah bagaimana memastikan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Dusun Sungai Buluh tetap terjaga kondisinya.

Peneliti mewawancarai Darma Suardi yang merupakan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo untuk mengetahui gambaran teknis mengenai DAS yang ada di Dusun Sungai Buluh. Menurut beliau kondisi DAS yang ada di Dusun Sungai Buluh sebenarnya masih cukup

baik. DAS yang ada di Dusun Sungai Buluh bukan termasuk DAS primer yang artinya memiliki kelebaran sungai, kedalaman dan panjang yang signifikan.

Darma Suardi menambahkan untuk Kabupaten Bungo pengelolaan DAS yang dilakukan adalah Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam skala DAS secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai strategi pengelolaan DAS di Kabupaten Bungo, Darma Suardi menjelaskan sebagai berikut: “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur - unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat dan pengelola sumberdaya alam tersebut. DAS dipandang sebagai basis utama yang tepat dalam membentuk unit pembangunan berkelanjutan yang berpilarkan ekologi, ekonomi dan sosial dikarenakan beberapa hal, yaitu: DAS merupakan sistem alami yang jelas batas-batasnya, rentang area dimulai dari pegunungan sampai dengan pesisir beserta area diantaranya, dapat memberikan pandangan secara holistik dari berbagai komponen pembentuknya, memperlihatkan bagaimana ekosistem dataran tinggi, rendah dan pesisir saling berhubungan dan sederhana dalam memonitoring pengaruh berbagai aktifitas/kegiatan terhadap lingkungan. Sebagai sebuah unit pembangunan berkelanjutan sistem DAS mempunyai kerangka kerja yang mendorong kolaborasi atau kerjasama diantara stakeholder (pemangku kewajiban) untuk mengelola, mempertahankan dan mendistribusikan manfaat kepada stakeholder generasi sekarang dan mendatang, diantara dan diluar unit tersebut.

Untuk kasus DAS Sungai Buluh saat ini memang mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terjadi akibat tekanan perubahan tata guna lahan yang terjadi. Baik di Dusun Sungai Buluh atau pun daerah-daerah yang terhubung secara sistemik dengan bentang ekologisnya. Menurut Darma Suardi, upaya normalisasi tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi DAS yang ada di Sungai Buluh karena secara teknis akan lebih sulit jika normalisasi dilakukan saat DAS dalam kondisi telah rusak.

Peneliti selanjutnya menanyakan upaya perbaikan apa yang telah dilakukan sebagai bagian dari normalisasi DAS yang ada di Dusun Sungai Buluh untuk mendukung pembangunan tata ruang yang kondusif. Menurut Kepala Seksi Pengkajian Kualitas Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Hari Saputra upaya yang dilakukan Bersama Dinas/Instansi terkaita dalah sebagai berikut:Menyiapkan rencana induk dan program kerja jangka menengah dan tahunan pengendalian pencemaran air dan peningkatan kualitas

air. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Berdasarkan rencana induk, melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam satu tim kerja yang dikoordinatori oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Pemantauan dilakukan secara periodik (baik kualitas air sungai maupun buangan limbah cair yang dominan) dan melaksanakan pengujian laboratorium serta evaluasi terhadap hasil uji tersebut. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Daerah (Bupati Bungo) dalam upaya pengendalian pencemaran air, penegakan aturan dan peningkatan kualitas air sungai. Penyediaan Debit Pemeliharaan Sungai berdasarkan kondisi lapangan, dapat disediakan sejumlah debit pemeliharaan sungai. Peningkatan Daya Dukung Sungai melalui pelaksanaan peningkatan daya dukung sungai dengan melaksanakan upaya pengendalian di instream (penggelontoran, penyediaan debit pemeliharaan, peningkatan kemampuan asimilasi sungai) dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengendalian pada sumber pencemaran melalui instrumen hukum maupun instrumen ekonomi di samping melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kontrol sosial dari masyarakat. Bersama dengan instansi/dinas terkait menyelenggarakan koordinasi penyiapan program dan implementasi pengendalian pencemaran dan limbah domestik, industri dan pertanian.

Selanjutnya dalam rangka normalisasi DAS untuk pembangunan tata ruang yang kondusif peneliti mewawancarai Kepala Seksi Rehabilitasi dan pemulihan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Rina Hartini. Beliau memberikan perspektif yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab DAS termasuk di Dusun Sungai Buluh potensial mengalami degradasi fungsi. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan lingkungan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebaliknya, kualitas lingkungan hidup yang rendah juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Makin bertambahnya jumlah penduduk dan makin meningkatnya kebutuhan akan kualitas hidup mendorong peningkatan kebutuhan manusia. Hal tersebut akan berdampak terhadap keberadaan sumber daya lahan dan keadaan keanekaragaman sumber daya alam.

Pada aspek lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian semata berupa penggunaan input produksi seperti pupuk dan pestisida yang berlebihan dan mengabaikan kelestarian lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menopang kehidupan manusia.

Hal ini lebih diperparah dengan penegakan hukum yang masih lemah, diskriminatif dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi kawasan. Sisi lain adanya pandangan secara parsial terhadap pembangunan menyebabkan masing-masing pemerintah daerah kabupaten lebih mementingkan pembangunan ekonomi untuk mengejar pendapatan asli daerah sehingga banyak terjadi perambahan kawasan berfungsi lindung untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Untuk DAS yang masuk dalam wilayah Dusun Sungai Buluh memang kondisinya memang belum sekritis DAS utama dalam Kabupaten Bungo seperti Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo yang mengalami sedimentasi karena penambangan pasir dan pencemaran karena proses tambang emas ilegal yang sering membuat merkuri yang merupakan zat beracun mencemari dan merusak kelangsungan biota sungai seperti ikan.

Walaupun demikian akibat tekanan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahun DAS di Dusun Sungai Buluh juga telah mengalami berbagai penurunan kualitas fisik dan fungsi seperti semakin dangkalnya kedalaman sungai, penyempitan lebar sungai serta tekanan terhadap bantaran sungai melalui akibat adanya pemukiman serta pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dikenal sangat banyak mengkomsumsi air. Untuk itu memang di butuhkan upaya langkah-langkah normalisasi yang termasuk didalamnya langkah pencegahan atau preventif. Sejauh ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memfokuskan upaya untuk normalisasi DAS di Sungai Buluh dengan melakukan pengawasan sekaligus memperkuat pemahaman tentang tata ruang dan wilayah yang berlaku di kawasan tersebut kepada semua pihak.

Suardi yang merupakan Rio Dusun Sungai Buluh menyatakan untuk normalisasi DAS yang ada di Sungai Buluh, pihak Pemerintah Dusun Sungai Buluh melakukan pembinaan dan penyuluhan agar masyarakat menjaga kelestarian aliran sungai yang ada di Dusun Sungai Buluh karena fungsinya yang penting. Untuk kepentingan aktivitas sehari-hari, sumber air dan juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti tambak atau kolam ikan air mengalir dalam bentuk keramba ikan.

Rio Sungai Buluh juga menyampaikan dalam program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJM Dusun Sungai Buluh, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian mengingat kondisi Dusun Sungai Buluh masih ada yang rawan banjir, salah satunya karena adanya DAS yang tak sanggup lagi menampung curah hujan yang tinggi.

M. Bajuri yang merupakan tokoh masyarakat Dusun Sungai Buluh menyampaikan saat beliau menjadi Rio Sungai Buluh pada periode sebelumnya keberadaan DAS di Dusun Sungai Buluh telah mendapatkan perhatian serius apalagi saat itu telah dibuka perkebunan Kelapa Sawit milik PT. BMM. Keberadaan areal perkebunan perusahaan tersebut di antaranya terdapat di sepanjang aliran DAS di Dusun Sungai Buluh. Secara teoritis keberadaan perkebunan tersebut akan memberikan pengaruh dalam bentuka aktivitas yang akan menambah beban atau tekanan terhadap fungsi sungai.

Suryadi yang merupakan tokoh pemuda di Dusun Sungai Buluh menyampaikan bahwa selama ini aliran DAS di Dusun Sungai Buluh kualitasnya masih cukup baik. Meskipun di beberapa titik sering mengalami banjir yang terkadang meluap ke pemukiman masyarakat namun fungsi-fungsi seperti untuk kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi. Ketersediaan biota atau makhluk hidup di DAS pun masih cukup baik. Hal itu dibuktikan, sampai saat ini

penggemar kegiatan memancing sering menjadikan aliran sungai di Dusun Sungai Buluh sebagai lokasi memancing.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Tokoh Adat Dusun Sungai Buluh yaitu Bapak Ramlan. Menurut Bapak Ramlan, memang dibandingkan kondisi belasan tahun silam keberadaan sungai-sungai di Dusun Sungai Buluh saat ini kualitasnya sudah berkurang namun demikian untuk membantu pemenuhan kehidupan sehari-hari masih memadai terutama yang berkaitan sebagai sumber untuk kolam ikan air mengalir atau tambak. Jumlahnya memang tidak banyak namun merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sungai Buluh.

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Ibu Fajariyah yang merupakan tokoh perempuan Dusun Sungai Buluh. Menurut Fajariyah, sejak pembangunan Bandara Muara Bungo keberadaan DAS di Sungai Buluh cukup mendapatkan perhatian selain itu memang masyarakat Dusun Sungai Buluh tidak lagi melakukan kegiatan dompeng sehingga kualitas DAS cukup baik

Kendala-kendala yang dihadapi dalam normalisasi DAS di wilayah Dusun Sungai Buluh sebenarnya lebih banyak disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Dusun Sungai Buluh mengenai fungsi sungai. Pemahaman mengenai peran lingkungan yang baik untuk mendukung kualitas hidup belum secara keseluruhan dimiliki. Akibatnya perlakuan terhadap sungai seperti membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan pohon di sekitar sungai yang potensial mengganggu kestabilan tanah di pinggir sungai dan berpotensi mengakibatkan longsor pada saat musim hujan masih terjadi.

Menurut Rina Hartini kendala-kendala yang dihadapi dalam normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) guna mewujudkan Pembangunan tata ruang serta mengatasi penyempitan aliran sungai di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran ekologis masyarakat Dusun Sungai Buluh yang masih dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan sungai melalui aktivitas membuang sampah secara langsung ke sungai serta adanya praktek PETI di beberapa titik DAS.
2. Belum adanya penataan kawasan strategis pedesaan sehingga di tingkat Dusun Sungai Buluh memang belum ada zonasi kawasan yang membuat masyarakat bebas saja melakukan aktivitas pembangunan tanpa perlu mempertimbangkan aspek-aspek ekologis dalam hal ini kelestarian dan kualitas serta fungsi DAS yang ada.
3. Pembangunan yang pesat di pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Bungo misalnya Bandar Udara Muara Bungo belum sepenuhnya memiliki proyeksi lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya berkaitan dengan kemampuan bentang alam termasuk DAS beradaptasi terhadap perubahan peruntukan lahan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Guna Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang Wilayah serta mengatasi penyempitan aliran sungai di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo maka dilakukan langkah sebagai berikut:

Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan. Percepatan pembangunan hanya mungkin dilakukan apabila dilakukan perubahan-perubahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) di pihak pemerintah daerah dan perbaikan kualitas sumber daya manusia dipihak masyarakat. Pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud apabila pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dengan melibatkan masyarakat. Pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan memberi teladan dan berani menindak setiap pelanggaran.
2. Menempatkan sumber daya manusia aparatur secara professional dan sesuai dengan kompetensi.
3. Mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsif dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan, budaya kerja keras serta disiplin tinggi.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang mampu memotivasi rakyat untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki.

Dari aspek perbaikan kualitas sumber daya manusia perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang trampil dan mandiri. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pendekatan penanganan DAS ialah aspek sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menerima, menerapkan, mengelola, dan mengembangkan sendiri teknologi tersebut atau dengan kata lain meningkatkan akseptibilitas masyarakat terhadap teknologi konservasi yang diterapkan.

Pendekatan teknis yang selama ini dijadikan sebagai alternatif pengendalian umumnya bersifat jangka pendek, disamping itu menyebabkan biaya sosial dan finansial yang tinggi, sehingga apabila pendekatan teknis/teknologi ini kurang didukung oleh pendekatan-pendekatan institusi, sosial, ekonomi dan kelembagaan yang mantap maka tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Kelembagaan yang dimaksud adalah mencakup aturan main, organisasi yang perilakunya dipengaruhi oleh aturan main tersebut, serta kelembagaan yang berupa ikatan-ikatan sosial di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang Wilayah serta mengatasi penyempitan aliran sungai di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo telah dijalankan namun belum maksimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya sistem perencanaan tata ruang dengan kawasan pedesaan.

Kendala-kendala dalam Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang Wilayah serta mengatasi penyempitan aliran sungai di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan dan belum adanya zonasi atau peruntukan kawasan sampai ke tingkat dusun.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya sistem perencanaan tata ruang dengan kawasan pedesaan: (1) Penguatan koordinasi dan kapasitas (2) Menempatkan SDM aparatur yang benar-benar memahami persoalan DAS (3) Mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsif dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan, budaya kerja keras serta disiplin tinggi dan mampu memotivasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

86363_HARRY WALUYO SAJATI_bab_1.pdf.crdownload. (n.d.).

Anna S (2001), *Model Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai*, Pustaka Utama, Surabaya,.

Asdak C (, 2007), *Hidrologi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.

Kasus, S., Sistem, P., & Drainase, P. (2016). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2010 – 2030 Oleh :, 2030.

Lembaga Gemawan, & ICW. (2013). Public review Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Retrieved from <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/publicreviewRTRWKalbar.pdf>

Moleong (1995), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,.

Santosa, E. (2014). Model Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan Kolam Retensi Tawang Berkelanjutan, (1994). Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/43072/>

Saridewi, T. R., Hadi, S., Fauzi, A., & Rusastra, I. W. (N.D.). Pengelolaan Usahatani Land Use Planning Of Ciliwung Watershed Area Using An Institutional Approach Through Farm Management Improvement Perspective, 87–102.

Seftyono, C. (2016). Dilema Implementasi Kebijakan Pembangunan Bantaran Kali Code-Yogyakarta, (January 2013), 1–114. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2949.5765>

Sugiyono (2001), *Metode penelitian Sosial*, Bandung: Alfabeta

Suripin (2002), *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Penerbit ANDI, Yogyakarta,

Tahun, K. E. C. K. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di, 2031(13).